

KLIPING BERITA MEDIA MASSA

Sabtu-Senin, 11-13 Juli 2020



BADAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN RAKYAT

KATA PENGANTAR

Klipping Media Massa adalah kumpulan guntingan berita yang kami sajikan secara rutin. Guntingan berita ini kami seleksi dari berita yang muncul di media cetak. Adapun tema berita yang kami pilih adalah berita yang berkaitan dengan organisasi dan substansi Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan yang berkaitan dengannya.

Kami berharap klipping ini bermanfaat untuk monitoring media BPIW.

Hormat kami

Tim penyusun

DAFTAR ISI

No	Media	Tanggal	News Title	Resume
1	Timesbanyuwangi.com	Senin, 13 Juli 2020	Kementerian PUPR RI: Pembangunan PLBN Sei Pancang Kurangi Disparitas di Wilayah Perbatasan	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kementerian PUPR RI) terus melanjutkan pembangunan infrastruktur guna meningkatkan daya saing nasional dan pemerataan hasil pembangunan, sekaligus mengurangi disparitas, khususnya di wilayah 3T (terdepan, terluar dan tertinggal). Untuk mendukung ketersediaan infrastruktur di wilayah terluar atau perbatasan, Kementerian PUPR RI membangun Pos Lintas Batas Negara (PLBN). https://www.timesbanyuwangi.com/berita/136755/kementerian-pupr-ri-pembangunan-plbn-sei-pancang-kurangi-disparitas-di-wilayah-perbatasan
2	Timespasuruan.com	Sabtu, 11 Juli 2020	Kementerian PUPR RI Lanjutkan Penataan Puncak Waringin di KSPN Labuan Bajo	Labuan Bajo, terus berbenah. Sebagai salah satu tujuan wisata unggulan di Indonesia, Labuan Bajo akan berubah wajahnya di masa mendatang karena saat ini tengah dilakukan pembangunan berbagai infrastruktur oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kementerian PUPR RI). https://www.timespasuruan.com/berita/136650/kementerian-pupr-ri-lanjutkan-penataan-puncak-waringin-di-kspn-labuan-bajo
3	Timesmalang.com	Minggu, 12 Juli 2020	Kementerian PUPR RI Tingkatkan Jaringan Jalan 5 KSPN Unggulan Non Super Prioritas	Di samping terus menyelesaikan pekerjaan infrastruktur 5 Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Super Prioritas yakni Danau Toba, Borobudur, Mandalika, Labuan Bajo dan Manado – Likupang, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kementerian PUPR RI) juga melanjutkan pembangunan pada 5 KSPN unggulan prioritas lainnya. https://www.timesmalang.com/berita/136715/kementerian-pupr-ri-tingkatkan-jaringan-jalan-5-kspn-unggulan-non-super-prioritas
4	Timesmalang.com	Minggu, 12 Juli 2020	Kementerian PUPR RI Kembangkan Teknologi Toilet Wisata Ramah Lingkungan	Untuk mendukung ketersediaan sarana dan prasarana sanitasi yang bersih dan layak di kawasan pariwisata, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kementerian PUPR RI) telah mengembangkan teknologi toilet wisata dengan dilengkapi sistem pengolahan air limbah yang ramah lingkungan. https://www.timesmalang.com/berita/136655/kementerian-pupr-ri-kembangkan-teknologi-toilet-wisata-ramah-lingkungan
5	Wowkeren.com	Sabtu, 11 Juli 2020	Kemenkeu Buka-Bukaan Memang Tak Menyiapkan Anggaran Untuk Pembangunan Ibu Kota Baru Akibat Pandemi Virus Corona. Lantas Sampai Mana Kelanjutan Megaproyek Ini?	Banyak hal yang mesti mengalami penyesuaian akibat pandemi virus Corona. Termasuk diantaranya pelaksanaan megaproyek pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) baru. Bahkan Kementerian Keuangan menyatakan dengan tegas tak ada anggaran dari negara untuk realisasi proyek tersebut. Pasalnya saat ini pemerintah masih berfokus pada penanganan COVID-19. https://www.wowkeren.com/berita/tampil/00319858.html
6	Timesbanyuwangi.com	Senin, 13 Juli 2020	Kementerian PUPR RI: Pembangunan PLBN Sei Pancang Kurangi Disparitas di Wilayah	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kementerian PUPR RI) terus melanjutkan pembangunan infrastruktur guna meningkatkan daya saing nasional dan pemerataan hasil pembangunan, sekaligus mengurangi disparitas, khususnya di wilayah 3T (terdepan, terluar dan

			Perbatasan	<p>tertinggal). Untuk mendukung ketersediaan infrastruktur di wilayah terluar atau perbatasan, Kementerian PUPR RI membangun Pos Lintas Batas Negara (PLBN).</p> <p>https://www.timesbanyuwangi.com/berita/136755/kementerian-pupr-ri-pembangunan-plbn-sei-pancang-kurangi-disparitas-di-wilayah-perbatasan</p>
7	Bisnis Indonesia, halaman 4	Senin, 13 Juli 2020	HK Butuh Dana Rp386 Triliun (13 Juli 2020)	PT Utama Karya (Persero) mengharapkan dukungan pemerintah guna mendapatkan pendanaan senilai Rp386 triliun untuk menuntaskan proyek Jalan Tol Trans Sumatra (JTTS). "Utama Karya sangat membutuhkan dukungan pemerintah karena proyek ini sangat tidak feasible, supaya bisa jalan [pendanaannya]," ujar Direktur Keuangan Utama Karya (HK) Hilda Savitri, Sabtu (11/7).
8	Bisnis Indonesia, halaman 17	Senin, 13 Juli 2020	Berharap Lumbang Pangan Tak Sekedar Dongeng	Peringatan Organisasi Pangan Dunia (Food and Agriculture Organization/ FAO) terkait dengan risikonya ketahanan pangan dunia di masa pandemi Covid-19, benar-benar membuka mata Presiden Joko Widodo.
9	Media Indonesia, halaman 9	Sabtu, 11 Juli 2020	Kerja Sama Siapkan Lumbang Pangan	Peringatan organisasi pangan dunia FAO kembali dikumandangkan Presiden Joko Widodo, kemarin. Diprediksi, krisis pangan akan melanda dunia karena pandemi dan musim yang sulit diatur.
10	Media Indonesia, halaman 4	Minggu, 12 Juli 2020	LHK dan PU-Pera Atasi Kebakaran Hutan	Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya menindaklanjuti pelaporan Kapolres Karanganyar AKBP Leganek Mawardi yang menginginkan dibuatkan kantor air di sumber air yang ada di lereng gunung, yang mampu memudahkan tim pemadam bertindak cepat saat terjadi kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) wilayah lereng dan pereng.
11	Media Indonesia, halaman 4	Senin, 13 Juli 2020	Pemerintah Cari Inovasi Dana Infrastruktur	Kementerian PUPR mendorong pendekatan program terintegrasi untuk mengatasi persoalan kekurangan dana dalam pembangunan infrastruktur di masa pandemi covid-19. "Pendekatan program terintegrasi perlu diterapkan untuk menutup kekurangan pendanaan pembangunan infrastruktur PU-Pera, khususnya dalam masa pandemi covid-19, antara lain melalui pembiayaan alternatif," ujar Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur PUPR, Eko D Heripoerwanto, dalam seminar daring Mencari alternatif Pembiayaan Infrastruktur di Era New Normal di Jakarta, Sabtu (11/7).

Judul	HK Butuh Dana Rp386 Triliun (13 Juli 2020)	Tanggal	Senin, 13 Juli 2020
Media	Bisnis Indonesia, halaman 4		
Resume	PT Hutama Karya (Persero) mengharapkan dukungan pemerintah guna mendapatkan pendanaan senilai Rp386 triliun untuk menuntaskan proyek Jalan Tol Trans Sumatra (JTTS). "Hutama Karya sangat membutuhkan dukungan pemerintah karena proyek ini sangat tidak feasible, supaya bisa jalan [pendanaannya]," ujar Direktur Keuangan Hutama Karya (HK) Hilda Savitri, Sabtu (11/7).		

| PROYEK TOL TRANS SUMATRA |

HK Butuh Dana Rp386 Triliun

Bisnis, JAKARTA — PT Hutama Karya (Persero) mengharapkan dukungan pemerintah guna mendapatkan pendanaan senilai Rp386 triliun untuk menuntaskan proyek Jalan Tol Trans Sumatra (JTTS).

"Hutama Karya sangat membutuhkan dukungan pemerintah karena proyek ini sangat tidak *feasible*, supaya bisa jalan [pendanaannya]," ujar Direktur Keuangan Hutama Karya (HK) Hilda Savitri, Sabtu (11/7).

Dia menjelaskan total dana yang dibutuhkan untuk membangun Jalan Tol Trans Sumatra senilai Rp476 triliun. "Saat ini yang sudah dipenuhi baru Rp90 triliun, yaitu dari ekuitas Rp55 triliun dan pinjaman atau *bond* Rp35 triliun, sedangkan sisanya kami masih membutuhkan Rp386 triliun lagi," ujarnya.

Dia mengakui salah satu kendala utama pengerjaan proyek ini adalah tidak layak secara perhitungan keekonomian.

Salah satu indikatornya adalah volume trafik pengguna tol ini. Dari data perseroan, hanya sekitar 10.000—11.000 kendaraan, di mana kondisi tersebut jauh di bawah standar minimal yaitu sebanyak 25.000 kendaraan.

Berdasarkan Perpres 117/2015, perseroan mendapatkan tugas dari pemerintah untuk membangun JTTS sepanjang 2.769 kilometer.

Hampir 5 tahun berjalan, saat ini Hutama Karya sudah membangun dan mengoperasikan tol Sumatra sepanjang 364 kilometer, yaitu pada ruas Medan—Binjai 17 kilometer, Bakauheni—Terbanggi Besar 140 kilometer, Palembang—In-

dralaya 22 kilometer, Terbanggi Besar—Pematang Panggang—Kayu Agung 185 kilometer.

Kemudian yang sedang dalam masa konstruksi 771 kilometer, dengan dua ruas yang segera beroperasi yaitu Pekanbaru—Dumai sepanjang 131 kilometer dan Sigli—Banda Aceh 73 kilometer, tepatnya di seksi IV sepanjang 13,5 kilometer.

Ada juga ruas persiapan konstruksi 319 kilometer dan sisanya ruas belum perjanjian perusahaan jalan tol (PPJT) 1.311 kilometer.

Saat ini, Hutama Karya menyiapkan sejumlah langkah mendapatkan alternatif pendanaan untuk melanjutkan proyek tersebut, di antaranya sekuritisasi aset perseroan sebagai jaminan untuk mendapatkan pendanaan. (Arif Gunawan)

Judul	Berharap Lumbung Pangan Tak Sekedar Dongeng	Tanggal	Senin, 13 Juli 2020
Media	Bisnis Indonesia, halaman 17		
Resume	Peringatan Organisasi Pangan Dunia (Food and Agriculture Organization/FAO) terkait dengan riskannya ketahanan pangan dunia di masa pandemi Covid-19, benar-benar membuka mata Presiden Joko Widodo.		



Peringatan Organisasi Pangan Dunia (Food and Agriculture Organization/FAO) terkait dengan riskannya ketahanan pangan dunia di masa pandemi Covid-19, benar-benar membuka mata Presiden Joko Widodo.

Tak lama setelah peringatan FAO muncul pada April 2020, Presiden Jokowi langsung menahkakan menteri untuk membangun lumbung pangan atau *Food Estate*. Konsep *Food Estate* tersebut meliputi pembukaan lahan baru untuk pertanian, yang terintegrasi dan berisikan tanaman pangan.

Kementerian Pertahanan, Kementerian PUPR dan Kementerian BUMN ditunjuk untuk kerja "keroyokan" mengerjakan program tersebut. Setelah melalui proses analisis, Kementerian PUPR akhirnya memilih lokasi lumbung pangan baru ini di Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah.

Food Estate ini akan menjadi salah satu Program Strategis Nasional (PSN) 2020–2024. Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menuturkan, terdapat lahan potensial seluas 165.000 hektare yang merupakan kawasan aluvial, bukan gambut, pada lahan eks-Pengembangan Lahan Gambut (PLG) di Kalteng.

Adapun, dari 165.000 hektare lahan itu, seluas 85.500 hektare merupakan lahan fungsional yang sudah digunakan untuk memproduksi setiap

tahunnya. Sementara itu, 79.500 hektare sisanya berupa semak belukar sehingga perlu dilakukan pembersihan.

Dari 85.500 hektare lahan fungsional, sekitar 28.300 hektare dinyatakan memiliki kondisi irigasinya baik, sedangkan 57.200 hektare lahan lainnya diperlukan rehabilitasi jaringan irigasi dengan total kebutuhan anggaran Rp1,05 triliun.

Dalam kunjungannya ke lokasi pengembangan *food estate*, Kamis (9/7), Presiden Jokowi mengatakan pengembangannya akan berbasis korporasi petani dan akan dilakukan secara terintegrasi mencakup pertanian, perkebunan, bahkan peternakan di suatu kawasan.

"Para petani yang menggarap lahan dan peternakan akan terkonsolidasi dalam kelompok-kelompok tani dengan terlebih dahulu difasilitasi, baik sarana maupun prasara, serta pendukung lainnya," ujar Jokowi.

Namun demikian, patut dicatat, konsep *food estate* era Jokowi ini bukanlah yang pertama kali dilakukan Indonesia. Sekitar 23 tahun silam, konsep ini sempat dimunculkan oleh Presiden Soeharto, dengan jargonnya "Sawah Sejuta Hektare" di lahan gambut.

Kebutuhan pula, salah satu lahan yang dituju untuk program di era Soeharto kala itu, adalah area yang disasar pemerintah Jokowi saat ini. Hanya saja, kala itu program pada Orde Baru tersebut gagal

terlaksana, lantaran terkendala oleh ketersediaan infrastruktur penunjang.

TIDAK MUDAH

Bayang-bayang kegagalan di era Soeharto tersebut yang seharusnya menjadi perhatian pemerintah era Jokowi saat ini. Perkara pembukaan area baru untuk pertanian pangan sejatinya tidak semudah membalikkan telapak tangan. Meskipun, lahan tersebut telah tersedia.

Guru besar Fakultas Pertanian Institut Pertanian Bogor (IPB) Dwi Andreas mengatakan, program *food estate* tak pernah mampu terwujud dengan baik sepanjang sejarah Indonesia.

Jargon pembentukan lumbung pangan baru hampir selalu gagal terlaksana dengan baik alias menguap tanpa jejak. "Selain era Soeharto, Kita juga pernah mengalami kegagalan saat era Presiden SBY, yang ingin membangun lumbung pangan baru seluas 300.000 hektare di Balaungan dan 100.000 hektare di Keta-pang juga gagal. Itu belum termasuk konsep cetak sawah 1,2 juta hektare di periode pertama Jokowi," katanya kepada *Bisnis*, Kamis (9/7).

Dia mengatakan, keputusan Jokowi untuk membangkitkan kembali konsep *food estate* sudah tepat. Bagaimana tidak, luas panen padi yang menjadi salah satu indikator ketahanan pangan nasional, terus mengalami penyusutan.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) menyebutkan, luas panen padi pada 2019 bering-sut menjadi 10,68 juta hektare dari tahun sebelumnya sebesar 11,37 juta hektare. Produksi padi pun turun dari 59,20 juta ton pada 2018 menjadi 54,60 juta ton pada 2019.

Untuk itu Dwi Andreas meminta pemerintah serius dalam menggarap konsep *food estate* kali ini. Dia menuturkan, setidaknya terdapat empat pilar yang harus diperhatikan pemerintah.

Pertama, kelayakan tanah dan dan kecocokan tanaman yang akan dikembangkan di area tersebut. **Kedua**, kelayakan infrastruktur pendukung seperti irigasi, transportasi pengang-



Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basoeki Hadimoejono, bersama Bupati Kapuas Ben Brahim S Bahat (kiri) dan jajaran melihat peta wilayah eks PLG yang berada di Kabupaten Kapuas, Sabtu (13/6).

kutan hingga ketersediaan bibit dan pupuk yang kontinu.

Ketiga, kelayakan teknologi untuk memaksimalkan produksi di area baru tersebut. Dwi menyoroti adanya ancaman hama yang bisa berkembang dengan cepat di area yang tergolong baru untuk pertanian. "Terakhir atau *keempat*, kelayakan sosial. Apakah keberadaan lahan untuk fungsi baru ini akan memunculkan potensi konflik dengan penduduk setempat. Poin ini akan sangat berpengaruh dengan kecepatan eksekusi *food estate*," ujarnya.

KAPABILITAS PEMERINTAH

Rencana pelaksanaan kebijakan *food estate* di era Jokowi kali ini sejatinya cukup baik. Konsep pengerjaan secara "keroyokan" antar kementerian setidaknya dapat menjawab persoalan kapabilitas pemerintah dalam melaksanakan program tersebut.

Dalam hal ini, Kementerian PUPR sebagai eksekutor penyediaan lahan dan infrastruktur pendukung seperti irigasi, lalu Kementerian BUMN sebagai pelaksana melalui PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) dan *off-taker* di tangan Perum Bulog (Persero), serta Kementerian Pertahanan sebagai pengaruh utama.

Namun ekonom Indef Rusli Abdullah menilai, terdapat

salah satu hal yang perlu dicermati, yakni kemampuan Kementerian Pertahanan untuk ikut serta dalam proyek ini. Dia menilai, kementerian yang dipimpin oleh Prabowo Subianto tersebut harus memahami bahwa pengembangan pertahanan di bidang pangan berbeda dengan militer.

Dia berharap pemerintah jangan hanya kuat dalam perencanaan alias di atas kertas. Pasalnya ketahanan pangan memiliki tingkat urgensi yang tinggi saat ini.

"Terlebih, apabila melihat laporan Global Food Security Index (GFSI), posisi Indonesia dalam hal ketahanan pangan tenggelam di posisi 62 dunia pada 2019. Indonesia bahkan tertinggal dari negara lain yang tak memiliki lahan pertanian yang besar seperti Singapura di posisi 1. Salah satu hal yang menjadi sorotan GFSI dalam laporan tersebut ada pada sisi distribusi, infrastruktur pertanian dan infrastruktur irigasi di Indonesia masih dinilai lemah. Tak heran jika masih sering terjadi kekurangan pasokan dan fluktuasi harga pangan.

Dengan demikian, pemerintah tak boleh setengah-setengah dalam menggarap proyek *food estate* ini. Adanya potensi terjadinya ledakan jumlah penduduk, harus diimbangi oleh ketersediaan pangan yang cukup. ■



Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (kiri) dan Gubernur Kalteng Supias Sabran (tengah) saat acara Gerakan Tanam Padi Serentak di Desa Belanti Siam, Kecamatan Pandih Batu, Pulang Pisau, Jumat (15/5).

Judul	Kerja Sama Siapkan Lumbung Pangan	Tanggal	Sabtu, 11 Juli 2020
Media	Media Indonesia, halaman 9		
Resume	Peringatan organisasi pangan dunia FAO kembali dikumandangkan Presiden Joko Widodo, kemarin. Diprediksi, krisis pangan akan melanda dunia karena pandemi dan musim yang sulit diatur.		

Kerja Bersama Siapkan Lumbung Pangan

PERINGATAN organisasi pangan dunia FAO kembali dikumandangkan Presiden Joko Widodo, kemarin. Diprediksi, krisis pangan akan melanda dunia karena pandemi dan musim yang sulit diatur.

“Menyikapi peringatan itu, kita menyiapkan cadangan logistik nasional,” kata Kepala Negara saat mengunjungi lokasi pengembangan lumbung pangan baru di Kabupaten Kapuas dan Pulang Pisau, Kalimantan Tengah.

Di Pulang Pisau, sekitar 10.000 hektare lahan di Desa Belanti Siam sudah disiapkan untuk jadi lumbung pangan baru.

Di Kapuas, lahan berada di Desa Bentuk Jaya, Kecamatan Dadahup, dengan persiapan lahan seluas 20.704 hektare.

“Tahun ini, setidaknya akan diselesaikan lahan pertanian baru seluas 30.000 hektare. Sampai dua tahun ke depan akan ditambah lagi menjadi 148.000 hektare di Pulang Pisau dan Kapuas,” kata Jokowi.

Kementerian Pertahanan akan bertindak sebagai *leading sector* untuk pengembangan lumbung pangan nasional baru. Mereka akan berkoordinasi dengan Kementerian Pertanian serta Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

sional nantinya dapat terpenuhi. Dengan pengelolaan yang baik, sebagian bisa diekspor ke negara lain.

Pertanian terintegrasi

Lumbung pangan nasional di Kalimantan Tengah ini tidak hanya berkonsentrasi pada padi, tapi juga jagung. Selain itu, aneka sayuran dan buah-buahan.

Pemerintah berencana membangun sarana produksi dan infrastruktur pertanian seperti embung dan irigasi.

“Penyediaan air untuk irigasi sangat penting karena lahan di sini aluvial, bukan gambut,” kata Menteri Basuki Hadimuljono.

Pemilihan Kapuas membuat Bupati Ben Brahim S Bahat berharap kesejahteraan cepat datang ke wilayahnya.

“Saya optimistis program ini mampu meningkatkan perekonomian dan menyerap tenaga kerja sehingga masyarakat lokal akan lebih makmur dan sejahtera.”

Di Jakarta, Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Kementerian Pertanian, siap mengawal program pengembangan lumbung pangan nasional di Kalimantan Tengah.

“Kami akan memberikan model integrasi tanaman padi sawah, hortikultura perkebunan,

Judul	LHK dan PU-Pera Atasi Kebakaran Hutan	Tanggal	Minggu, 12 Juli 2020
Media	Media Indonesia, halaman 4		
Resume	Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya menindaklanjuti pelaporan Kapolres Karanganyar AKBP Leganek Mawardi yang menginginkan dibuatkan kantong air di sumber air yang ada di lereng gunung, yang mampu memudahkan tim pemadam bertindak cepat saat terjadi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) wilayah lereng dan pereng.		

LHK dan PU-Pera Atasi Kebakaran Hutan

MENTERI Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya menindaklanjuti pelaporan Kapolres Karanganyar AKBP Leganek Mawardi yang menginginkan dibuatkan kantong air di sumber air yang ada di lereng gunung, yang mampu memudahkan tim pemadam bertindak cepat saat terjadi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) wilayah lereng dan pereng.

"Apa yang disampaikan Pak Kapolres (Karanganyar) tadi memang betul. Bisa menjadi berbahaya kalau tidak ada sumber air yang dekat dengan titik api. Karena itu, saya akan telepon Menteri PU-Pera agar sumber air di kawasan lereng tetap terjaga dan dibuat memadai sebagai antisipasi (munculnya) kebakaran hutan di lereng-lereng gunung," tegas Siti Nurbaya dalam kunjungan kerja di wilayah Gunung Lawu, Karanganyar, kemarin.

Setidaknya ada 25 titik rawan kebakaran hutan di Pulau Jawa yang kebanyakan merupakan lereng dan pereng gunung.

Selama di lereng Lawu, Menteri LHK Siti Nurbaya didampingi Dirjen Pengen-

dalian Air DAS dan Hutan Lindung (PDASHL) selain melakukan penanaman bibit pohon sakura di Taman Sakura Lawu, Cemoro Kandang, juga menyosialisasikan program kerja rehabilitasi hutan dan lahan 2020.

Pemulihan hutan

Siti Nurbaya memberikan apresiasi atas program pemulihan hutan dan lahan lewat program rehabilitasi yang dilakukan Pemkab Karanganyar bersama Perhutani di Lereng Lawu, bersamaan dengan penataan taman wisata alam dan juga pelibatan masyarakat kawasan hutan dalam program hutan sosial. Selain itu, juga bagaimana mengelola kawasan taman wisata alam lebih berdaya, tanpa mengganggu program rehabilitasi hutan dan lahan yang menjadi program utama Presiden Jokowi.

Bersama dengan Perhutani dan juga dukungan Komisi IV DPR RI, program rehabilitasi yang mencakup konservasi ini akan menysasar 54 taman nasional serta lebih 500 taman wisata alam. (WJ/I-1)

Judul	Pemerintah Cari Inovasi Dana Infrastruktur	Tanggal	Senin, 13 Juli 2020
Media	Media Indonesia, halaman 4		
Resume	Kementerian PUPR mendorong pendekatan program terintegrasi untuk mengatasi persoalan kekurangan dana dalam pembangunan infrastruktur di masa pandemi covid-19. "Pendekatan program terintegrasi perlu diterapkan untuk menutup kekurangan pendanaan pembangunan infrastruktur PU-Pera, khususnya dalam masa pandemi covid-19, antara lain melalui pembiayaan alternatif," ujar Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur PUPR, Eko D Heripoerwanto, dalam seminar daring Mencari alternatif Pembiayaan Infrastruktur di Era New Normal di Jakarta, Sabtu (11/7).		

Pemerintah Cari Inovasi Dana Infrastruktur

Dari Rp6.445 triliun dana yang dibutuhkan untuk pembiayaan pembangunan infrastruktur, pemerintah hanya sanggup Rp2.385 triliun atau 37%-nya.

M IQBAL AL MACHMUDI
iqbal@mediaindonesia.com

KEMENTERIAN Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU-Pera) mendorong pendekatan program terintegrasi untuk mengatasi persoalan kekurangan dana dalam pembangunan infrastruktur di masa pandemi covid-19.

"Pendekatan program terintegrasi perlu diterapkan untuk menutup kekurangan pendanaan pembangunan infrastruktur PU-Pera, khususnya dalam masa pandemi covid-19, antara lain melalui pembiayaan alternatif," ujar Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Kementerian PU-Pera, Eko D Heripoerwanto, dalam seminar daring Mencari Alternatif Pembiayaan Infrastruktur di Era New Normal di Jakarta, Sabtu (11/7).

Dalam catatannya, dana yang dibutuhkan untuk pembangunan infrastruktur sepanjang 2020-2024 sebanyak Rp6.445 triliun. Pemerintah hanya menanggung Rp2.385 triliun atau 37%, pendanaan BUMN (State Owned Enterprises/SOE) sebesar Rp1.353 triliun atau 21%, dan pihak swasta sebesar Rp2.707 triliun atau 42%.

Karena itu, upaya yang diperlukan untuk memenuhi *funding gap* infrastruktur dalam lima tahun ke depan itu dengan pendekatan terinteg-

Pemerintah hanya menanggung Rp2.385 triliun atau 37% untuk pembangunan infrastruktur.

rasi, yakni dengan memfungsikan APBN sebagai katalisator swasta dalam berinvestasi. Kemudian penerapan *eligibility rule* proyek kerja sama pemerintah dengan badan usaha (KPBU) bidang PUPR didasarkan pada besaran atau skala proyek dan indikasi pengembalian investasi.

Dengan model tersebut, pemerintah menerapkan konsep piramida terbalik dengan tidak mengutamakan kerangka APBN, tetapi lebih mengutamakan kerja sama antara swasta dan BUMN.

Proyek yang dibiayai APBN ataupun swasta harus berjalan bersamaan dan saling melengkapi satu sama lain, serta mendorong perwujudan konsep pendanaan infrastruktur dalam memperkuat ekuitas proyek.

"Salah satu strategi pembangunan infrastruktur PU-Pera tahun 2020-2024, yakni mengembangkan strategi pembiayaan alternatif untuk menutupi kekurangan pendanaan melalui skema KPBU dan skema lainnya yang menarik bagi investor," katanya.

Upaya-upaya yang perlu dilakukan untuk menutupi kekurangan pendanaan infrastruktur selama lima tahun mendatang, antara lain perlu adanya inovasi dalam penyediaan infrastruktur yang terdiri atas pendanaan, pembiayaan, dan pelaksanaan proyek.

Jenis pembiayaan

Pada diskusi yang sama, Direktur Pengelolaan Dukungan Pemerintah dan Pembiayaan Infrastruktur Direktorat Jenderal Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan, Brahmantio Isdijoso, mengatakan kementerianya membagi empat golongan alternatif pembiayaan.

"Pertama, skema kerja sama antara pemerintah dan badan usaha (KPBU) yang merupakan alternatif prioritas untuk proyek infrastruktur yang layak secara keuangan dan menarik minat investor," ujarnya.

Kedua, *blended financing* dengan mengombinasikan skema KPBU dengan instrumen pembiayaan lainnya.

Ketiga, skema penugasan BUMN yang memungkinkan pemerintah *me-leverage* dana APBN dalam pembiayaan infrastruktur dengan mengombinasikannya dengan penjaminan penugasan BUMN.

"Dan terakhir, Hak Pengelolaan Terbatas (HPT) sebagai opsi pembiayaan infrastruktur spesifik untuk proyek *brownfield*," jelas Brahmantio. (Ant/E-2)